

Efektivitas Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun Kecamatan Pungging Mojokerto

Ferisha Ainurrahmasari Purwanto¹, Hendra Sukmana²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Jl. Mojopahit No. 666 B, Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 61215, Indonesia

E-mail: hendra.sukmana@umsida.ac.id*

Abstract: The objective of this research is to assessment how the n rapikon-Cash Food Assistance (BPNT) concept is executed in Bangun Village by focusing on the accuracy of targeting, mechanisms of service delivery, and the effectiveness of data management via the SIKS-NG system. A qualitative methodology was adopted, which included comprehensive interviews with the Welfare Affairs Officer and the Village Head, observations in the field, and analysis of documents related to digital recipient data. Results show that the processes for verification and validation are carried out through a mix of electronic registration alongside assessments conducted by village authorities. The village is crucial in maintaining data reliability, handling grievances, and working with BPNT facilitators to rectify data issues. Nonetheless, the SIKS-NG system only presents data from the current year, which restricts the village's capacity to assess the long-term continuity of beneficiaries. Therefore, while the BPNT is implemented in accordance with operational guidelines, it still encounters structural issues due to the limitations of the information system.

Keywords: BPNT ; targeting accuracy ; policy implementation ; SIKS-NG ; social assistance

Abstrak: Penelitian ini ditujukan guna menganalisis pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dusun Bangun dengan memperhatikan ketepatan sasaran, mekanisme layanan, serta efektivitas pengelolaan data menggunakan sistem SIKS-NG. Metode kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dengan Kaur Kesra dan Kepala Desa, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen digital yang berhubungan dengan daftar penerima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi penerima BPNT dilaksanakan melalui kombinasi pencatatan secara digital dan pemeriksaan nyata oleh perangkat desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam menjamin konsistensi data, menangani keluhan, serta mengkoordinasikan pemutakhiran data bersama pendamping BPNT. Namun, sistem SIKS-NG hanya menunjukkan data untuk tahun ini, sehingga membatasi kemampuan desa dalam mengevaluasi keberlanjutan penerima untuk jangka panjang. Dengan demikian, meskipun telah memenuhi prosedur operasional, pelaksanaan BPNT masih menghadapi tantangan struktural pada aspek sistem informasi.

Kata kunci: BPNT ; ketepatan sasaran ; implementasi kebijakan ; SIKS-NG ; bantuan sosial

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketidakpastian dalam ketersediaan makanan masih merupakan masalah utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam mencapai Tujuan SDGs Pertama (penghapusan kemiskinan) dan Tujuan Kedua (penghapusan kelaparan) (Hadita et al., 2021). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, taraf ketidakmampuan tercatat sebesar 8,47% yang setara dengan berkisar 23,85 juta orang, merosot 0,10% dibandingkan September 2024, sementara angka kemiskinan ekstrem mencapai 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang berdasarkan garis kemiskinan Rp609.160 per kapita dalam sebulan (Widiati, 2024). Walau demikian, penurunan ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti dalam kualitas hidup, karena masyarakat yang hidup dalam kemiskinan masih menghadapi tekanan inflasi pangan setelah pandemi COVID-19, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi antar wilayah, serta besarnya kerentanan terhadap perubahan ekonomi. Efek dari situasi ini berpengaruh luas terhadap ketahanan pangan, kesehatan, serta kestabilan sosial-ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak cuma meningkatkan pendapatan, namun juga memperkuat sistem perlindungan sosial yang responsif dan bisa beradaptasi (Nizar Purnama, 2023).

Prevalensi stunting pada anak balita merupakan indikator yang krusial dalam ketahanan pangan, karena terkait dengan masalah kekurangan gizi yang berlangsung lama, di mana bisa berimbas negatif atas kualitas sumber daya manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp300 triliun per tahun akibat berkurangnya produktivitas di masa depan (Alfia, 2016). Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di tingkat nasional telah menurun dari 21,5% di 2023 jadi 19,8%, meskipun masih melebihi target 18,8% yang ditetapkan dalam Stranas Stunting 2025 (Rahmawati, 2024). Dalam rangka mempercepat penurunan stunting, intervensi bantuan pangan yang menjadi salah satu pilar terbukti efektif dengan odds ratio (OR) mencapai 2,62 pada keluarga yang kurang mampu (Sitompul & Rajagukguk, 2024). Kebijakan tersebut selaras atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menekankan pentingnya perlindungan sosial dan pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Untuk mendukung inisiatif ini, pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan guna menguatkan akses pendidikan, kesehatan, serta keamanan (Feny Sahara et al., 2022). Selain itu, Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) juga diterapkan lewat mekanisme perbankan berbasis digital guna menguatkan efisiensi distribusi, ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan (Pramesti et al., 2019). Pendekatan ini diperkuat dengan upaya peningkatan kualitas layanan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan (Oktavia & Djameluddin, 2024).

Untuk memberikan pandangan yang lebih terstruktur mengenai kondisi saat ini, Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik terbaru mengenai kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia

Tabel 1. Statistik Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Indonesia pada Tahun 2024

Indikator	Nilai
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,47
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	23,85 juta
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	609.160
Prevalensi Stunting (%)	19,8 (SSGI 2024)
Kemiskinan Ekstrem (%)	0,85

Sumber; Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan informasi dari Tabel 1, terdapat perubahan pada indikator kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia yang berpangkal pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Pada bulan Maret 2025, angka kemiskinan tercatat di angka 8,47% atau setara dengan 23,85 juta orang, dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,85%. Di sisi lain, angka stunting melewati pengurangan dari 21,5% di periode 2023 jadi 19,8% di periode 2024, meski masih melebihi target nasional sebesar 18,8% pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masalah ketahanan pangan dan gizi tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam pembangunan nasional. Sebagai langkah strategis, pemerintah telah menjalin Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak sekitar 2017 di mana berbasis teknologi digital (Praja, 2020).

Program ini memiliki landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Permensos Nomor 11 Tahun 2018, serta Inpres Nomor 4 Tahun 2022 (Firdausya & Ompusunggu, 2023) pelaksanaannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat pertolongan sejumlah Rp200. 000 secara bulanan lewat Kartu Keluarga Sejahtera guna pengadaan makanan bergizi (Putra et al., 2022). Pelaksanaan BPNT mengikuti prinsip 6T untuk memastikan akurasi dan tanggung jawab program (Tris Dina Susanti, 2024). Dari segi sosial, BPNT

memiliki peran dalam meringankan beban pengeluaran, memperluas akses terhadap pangan bergizi, serta mendukung pengentasan kemiskinan multidimensional dan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Puspita, 2023).

Peranan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan akses pangan serta keamanan masyarakat terlihat dari kontribusinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 0,5 poin persen, terutama pada rumah tangga miskin yang tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Nazalia & Riyadh UB, 2022) . Program ini juga berperan dalam memperkuat ketahanan pangan dalam kerangka Stranas Stunting dengan meningkatkan asupan gizi, terutama protein hewani, di mana bisa mengurangi angka stunting hingga 15 persen atas golongan penerima manfaat. Berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu, BPNT lebih fokus pada penyediaan pangan non-tunai dan ialah pengembangan terkait program Rastra/Raskin (Sahara et al., 2022). Melalui penerapan digital, BPNT memberikan kebebasan kepada penerima untuk memilih jenis bahan pangan, mengurangi kebocoran dalam distribusi, serta meningkatkan mutu bantuan. Hingga tahap III (Juli-September 2025), penyaluran BPNT telah mencapai 82,95% dari target 18 juta KPM, yang mencerminkan peningkatan efektivitas dalam distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan transparan (Normalita et al., n.d.).

Di tingkat lokal, pelaksanaan BPNT di Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui mekanisme terstruktur, mulai dari penentuan KPM berdasarkan DTKS yang diverifikasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan difasilitasi oleh TKSK, hingga penyaluran bantuan melalui Bank Himbara, khususnya BNI. Setiap KPM mendapat pertolongan sejumlah Rp200. 000 setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di mana bisa dipakai di e-warong guna pengadaan bahan pangan secara non-tunai. Sistem ini mendukung pencatatan transaksi digital yang meningkatkan transparansi dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial dan TKSK memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis serta menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan, ditopang oleh pengawasan dari inspektorat dan mekanisme pengaduan yang berjenjang. Pendekatan ini menunjukkan usaha integratif dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan program dalam memperkuat ketahanan pangan di masyarakat.

Berikut disajikan info pertumbuhan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mojokerto selama periode 2021-2024, yang menunjukkan arah pelaksanaan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat miskin di tingkat lokal:

Tabel 2. Data Perkembangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Nilai Bantuan (Rp/KPM/Bulan)
2021	36.000 KPM	Rp150.000
2022	35.691 KPM	Rp200.000
2023	34.500 KPM	Rp200.000
2024	83.589 KPM	Rp200.000 + 10 kg beras

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (2025); BPS Kabupaten Mojokerto (2024) diolah Peneliti (2025)

Data yang terdapat di Tabel 2 menunjukkan bahwa implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mojokerto telah mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan hubungan antara kemampuan pemerintah dalam memverifikasi data dan kondisi ekonomi sosial komunitas. Sejak fase konsolidasi pada 2021 melalui digitalisasi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan e-warong, program ini terus berkembang, dan pada 2022 berperan dalam pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 10,62 persen. Namun, peningkatan jumlah penerima manfaat pada 2024 yang mencapai lebih dari 83 ribu KPM menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi setelah pandemi dan inflasi pangan masih tinggi, sehingga BPNT beralih dari bantuan yang sifatnya kompensatif menjadi alat strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat. Perubahan ini juga terlihat dari upaya memperluas jaringan e-warong dan verifikasi data hingga tahun 2025, yang menjadikan pengelolaan bantuan lebih inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tingkat lokal, Desa Bangun yang terletak di Kecamatan Pungging dengan populasi sekitar lima ribu orang yang mayoritas bekerja sebagai petani, buruh, dan pelaku usaha mikro, menjadikan BPNT sebagai pilar utama bagi ketahanan pangan. Program ini, yang didanai oleh pemerintah pusat dan anggaran daerah, sangat penting dalam memperkuat perlindungan sosial yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta menjaga kesejahteraan masyarakat yang rentan (Mawarda et al., 2025).

Berdasarkan observasi lapangan, pelaksanaan Program Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) di Wilayah Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dilaksanakan melalui penyaluran dana yang seketika disetorkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan sistem perbankan. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap mengikuti pedoman dari Kementerian Sosial dan disesuaikan dengan kondisi setempat agar lebih efisien. Setiap KPM mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bermanifestasi menjadi rekening sekaligus alat untuk bertransaksi, dengan bantuan sebesar Rp200. 000 secara bulanan yang ditarik setiap tiga bulan sekali sehingga totalnya mencapai Rp600. 000 untuk setiap periode. Sumbangan tersebut dapat diambil melalui agen bank atau Bank BNI dengan pengawasan dari TKSK dan aparat desa untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena mempercepat distribusi serta meminimalisir ketergantungan pada e-warong, meskipun masih ada beberapa masalah teknis seperti kehilangan kartu ATM, lupa PIN, dan keterlambatan dalam transfer yang ditangani melalui kerja sama antara KPM, TKSK, perangkat desa, bank, dan Dinas Sosial. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi lokal tanpa mengubah sasaran utama program, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdapat pada situasi miskin dan rentan.

Berikut adalah informasi tentang kuantitas penerima pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun serta wilayah Kecamatan Pungging secara umum, sebagai gambaran empiris terkait implementasi kebijakan sosial yang berfokus pada bantuan pangan di tingkat local.

Tabel 3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

Tahun	Program BPNT (KPM)
2022	90
2023	95
2024	100
2025	98

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (2025), DTKS (2025), dan hasil observasi lapangan.

Berdasarkan Tabel 3, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terdapat 90 KPM, kemudian meningkat menjadi

95 KPM pada tahun 2023 dan 100 KPM pada tahun 2024. pada tahun 2025, berdasarkan pendataan awal terdapat 100 calon KPM. Namun, setelah dilakukan proses verifikasi terhadap kondisi dan desil kesejahteraan penerima, jumlah KPM yang dinyatakan berhak menerima bantuan menjadi 98 orang.

Pengurangan jumlah tersebut terjadi karena terdapat 2 orang yang berdasarkan hasil pendataan memiliki tingkat desil 6-10, sehingga tidak termasuk dalam kelompok yang menjadi sasaran penerima BPNT berdasarkan ketentuan dan kriteria yang digunakan dalam pendataan kesejahteraan sosial. Dengan semikian, angka 100 pada pendataan awal tahun 2025 belum dapat langsung dianggap sebagai jumlah akhir penerima. Setelah dilakukan verifikasi, terdapat 2 orang yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima sehingga jumlah KPM tahun 2025 menjadi 98 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan jumlah KPM tidak selalu berarti adanya peningkatan atau penurunan jumlah masyarakat miskin secara langsung. Perubahan jumlah penerima dapat terjadi karena adanya proses pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data serta perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, data KPM dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana proses penetapan dan tetepatan sasaran penerima bantuan dilakukan di Desa Bangun.

Adanya perubahan dari 100 calon penerima menjadi 98 KPM pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa proses pendataan dan verifikasi memiliki peranan penting dalam menentukan ketepatan sasaran program. Pemerintah desa tidak hanya menerima data penerima secara administratif, tetapi juga perlu memperhatikan perubahan kondisi masyarakat agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima. Kementerian Sosial menjelaskan bahwa Program Sembako merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, keluarga miskin, dan keluarga rentan. Data penerima menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sehingga proses pendataan dan pemutakhiran menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan sasaran program.

Pada tahun 2025, penentuan sasaran bantuan sosial juga menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam sistem tersebut, keluarga dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi sosial ekonomi, yang mempertimbangkan berbagai variabel seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi

tempat tinggal, daya listrik, dan kepemilikan aset. Berdasarkan informasi resmi Kementerian Sosial, desil 1-4 atau 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan Sembako. Desil tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran bantuan sosial. Kementerian Sosial mencantumkan beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjadi KPM, antara lain berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, pensiunan ASN atau TNI/Polri yang menerima dana pensiun, pendamping sosial, guru tersertifikasi, memiliki penghasilan rutin yang bersumber dari APBN/APBD, serta memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota. Data kependudukan penerima juga harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah dipadankan dengan data kependudukan.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa penerima bantuan tidak hanya berdasarkan kondisi ekonomi yang terlihat di lingkungan masyarakat, tetapi juga melalui proses pendataan, pemadanan data, dan penilaian tingkat kesejahteraan. Kementerian Sosial menegaskan bahwa pemutakhiran data diperlukan karena kondisi masyarakat dapat berubah, misalnya karena perubahan pekerjaan, tempat tinggal, maupun kondisi ekonomi keluarga. Kondisi tersebut sesuai dengan temuan penelitian di Desa Bangun pada tahun 2025. Berdasarkan pendataan awal terdapat 100 calon KPM, tetapi setelah dilakukan verifikasi diketahui bahwa 2 orang berada pada desil 6-10, sehingga tidak termasuk dalam kelompok sasaran bantuan yang digunakan dalam penetapan KPM. Dengan demikian, jumlah penerima yang ditetapkan menjadi 98 KPM. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi memiliki peran penting dalam memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kasus perubahan dari 100 calon KPM menjadi 98 KPM dapat menjadi salah satu bukti bahwa ketepatan sasaran tidak hanya dilihat dari jumlah penerima yang terdaftar, tetapi juga dari kesesuaian kondisi penerima dengan kriteria program. Hal ini memperkuat indikator ketepatan sasaran dalam penelitian karena menunjukkan adanya proses pemeriksaan dan penyeduaian data sebelum penerima ditetapkan sebagai KPM.

Selain permasalahan terkait ketepatan sasaran penerima, pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun juga menghadapi permasalahan pada aspek sosialisasi program. Sosialisasi memiliki peran penting

dalam pelaksanaan program bantuan sosial karena melalui kegiatan tersebut informasi mengenai ketentuan, mekanisme, hak dan kewajiban penerima, serta perubahan kebijakan dapat disampaikan kepada masyarakat secara jelas. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh di lokasi penelitian, sosialisasi mengenai program BPNT belum dilaksanakan secara rutin dan berkala, melainkan cenderung dilakukan ketika terdapat permasalahan atau informasi tertentu yang perlu segera disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). dengan kata lain, pelaksanaan sosialisasi masih bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul, bukan dilakukan secara terjadwal sebagai bagian dari pelaksanaan program.

Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu aspek yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan BPNT di Desa Bangun. Sosialisasi yang tidak dilakukan secara rutin berpotensi menyebabkan informasi mengenai program tidak diterima secara merata oleh seluruh KPM. Masyarakat penerima bantuan dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai mekanisme program, perubahan ketentuan, maupun hak dan kewajibannya sebagai penerima manfaat. Padahal, penyampaian informasi secara berkala diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai program yang diterimanya. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi perlu dilihat sebagai bagian dari proses pencapaian tujuan program, khususnya memastikan bahwa KPM memperoleh informasi yang diperlukan selama program berlangsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu ketepatan sasaran penerima dan pelaksanaan sosialisasi program. Pada aspek ketepatan sasaran, terdapat perubahan jumlah KPM pada tahun 2025 dari 100 orang menjadi 98 orang setelah dua KPM diketahui berada pada desil 6-10 dan tidak lagi memenuhi kriteria penerima BPNT. Sementara itu, pada aspek sosialisasi program, pelaksanaan kegiatan yang cenderung dilakukan ketika muncul permasalahan menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada KPM belum sepenuhnya dilakukan secara rutin. Kedua kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan BPNT di Desa Bangun Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (2007), yang menyoroti tiga indikator utama, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan, sebagai kerangka untuk menilai

pelaksanaan BPNT di Desa Bangun. Ketepatan sasaran berhubungan dengan keakuratan data KPM sesuai DTKS supaya pertolongan bisa didapat bagi warga yang sungguh-sungguh membutuhkan, sedangkan sosialisasi program mengevaluasi seberapa baik masyarakat memahami mekanisme dan tujuan BPNT, dan pencapaian tujuan mengukur dampak program dalam meningkatkan akses pangan serta meminimalisir beban ekonomi secara berkelanjutan. Meskipun sebelumnya banyak penelitian yang membahas aspek teknis pelaksanaan BPNT di berbagai tempat (Budyanti et al., 2023). Kajian di tingkat desa masih sangat jarang, terutama dalam menilai efektivitas dengan cara meluas. Maka darinya, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui analisis di tingkat lokal, mengingat di lapangan masih ada masalah seperti data DTKS yang tidak akurat, sosialisasi yang kurang maksimal, serta pencapaian tujuan yang belum optimal akibat masalah distribusi dan kualitas bantuan, sehingga evaluasi yang berdasarkan indikator Budiani sangat penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program BPNT memiliki peran dalam meningkatkan akses terhadap kebutuhan pangan serta meminimalisir beban ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu, meskipun masih terdapat berbagai tantangan. Analisa dari (Puspita, 2023) mengungkapkan bahwa BPNT berkontribusi untuk mencukupi keperluan pangan, namun mengalami hambatan terkait keterlambatan distribusi, kurangnya pilihan yang tersedia, dan minimnya sosialisasi. Temuan dari (Zakaria Habib Al-Ra'zie et al., 2025) juga membuktikan bahwa BPNT efektif dalam bentuk non-tunai, tetapi tetap mengalami kesulitan dalam hal akurasi data dan koordinasi, sementara (Pratiwi & Sukmana, 2022) menegaskan bahwa bantuan sosial seperti BLT dan sembako sangat berpengaruh dalam menjaga kemampuan belanja masyarakat di masa pandemi. Di sisi lain, hasil pengamatan di Desa Bangun menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT masih menghadapi masalah seperti ketidakakuratan data DTKS, rendahnya sosialisasi, keterlambatan dalam penyaluran, serta kurangnya kerja sama antara pelaksana dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Maka darinya, penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas BPNT di Desa Bangun dengan menerapkan teori Budiani (2007) yang menekankan pada indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yakni metode yang menurut (Creswell, 2007) berfungsi guna mendalami substansi suatu fenomena sosial melalui sudut pandang partisipan (Creswell, 2009). Pendekatan tersebut ditentukan demi dinilai sanggup menghadirkan pemahaman mendalam mengenai efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tingkat desa, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian berlokasi di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dipilih secara purposive (Lenaini et al., 2021). Tempat penelitian berada di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dipilih karena populasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cukup besar, serta mencerminkan wilayah semi-perkotaan dengan karakteristik pendistribusian bantuan yang unik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas informan utama dan informan pendukung. Informan utama meliputi Kepala Desa Bangun, Dedik Ishariyanto, dan Kaur Kesra Desa Bangun, Mashuri yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pelaksanaan dan administrasi BPNT. Selain itu, penelitian juga melibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Ibu Wiwit (45 tahun) sebagai informan pendukung untuk memperoleh informasi dari perspektif penerima program. Pemilihan KPM dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan sebagai penerima langsung bantuan dan pengalaman KPM dalam mengikuti proses sosialisasi, pencairan, serta pemanfaatan bantuan. Penambahan perspektif KPM dilakukan untuk membandingkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa dengan pengalaman masyarakat sebagai kelompok sasaran program. Dengan demikian, informasi mengenai efektivitas BPNT tidak hanya diperoleh dari pihak pelaksana, tetapi juga dari pihak yang menerima manfaat secara langsung. Data dari Kepala Desa dan Kaur Kesra digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaksanaan, verifikasi data, dan sosialisasi program, sedangkan informasi dari KPM digunakan untuk mengetahui pengalaman penerima terkait ketepatan sasaran, pemahaman terhadap informasi program, kemudahan pencairan, serta manfaat bantuan yang diterima.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta pengumpulan dokumen. Wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi mengenai ketepatan sasaran,

sosialisasi program, cara distribusi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Observasi dilaksanakan terkait mengikuti proses penyaluran bantuan secara langsung, sedangkan dokumentasi meliputi analisis terhadap DTKS, laporan dari Dinas Sosial, dan arsip desa sebagai sumber data pendukung. Proses analisis data menggunakan metode analisis tematik dengan tahapan: (1) pengurangan data melalui pengkodean untuk menemukan tema-tema utama, (2) penyajian data dalam format naratif deskriptif serta tabel untuk memudahkan pemahaman, dan (3) pembuatan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antar tema yang diperoleh di lapangan.

Untuk memastikan keakuratan data, penelitian tersebut mempergunakan teknik triangulasi secara terstruktur, yang terdiri dari: (1) triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, (2) triangulasi metode dengan mencocokkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta (3) triangulasi data dengan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan dokumen resmi seperti DTKS dan laporan Dinas Sosial. Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan untuk menjamin kesesuaian antara interpretasi peneliti dan realitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan BPNT di Desa Bangun, khususnya dalam hal ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pencapaian tujuan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran adalah parameter utama dalam mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial, yang menurut Budiani (2007) berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk menjangkau kelompok penerima yang memenuhi syarat secara adil dan berdasarkan kebutuhan. Parameter ini bukan sebatas bergantung pada keakuratan data administratif semacam DTKS, akan tapi pada proses verifikasi sosial di lapangan, kolaborasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks BPNT di Desa Bangun, yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang beragam dan sebagian masyarakatnya berpenghasilan rendah, ketepatan sasaran menjadi cukup fundamental guna menjamin bantuan yang diberikan sungguh-sungguh bermanfaat. Pelaksanaan BPNT dilakukan

berdasarkan data DTKS yang dikelola dalam SIKS-NG, kemudian diverifikasi oleh pemerintah desa bersama RT/RW dalam musyawarah desa untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi nyata masyarakat, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat dan tidak tumpang tindih dengan program lain seperti PKH atau BLT Dana Desa.

Pelaksanaan BPNT di Desa Bangun menunjukkan adanya kerja sama antara pendamping BPNT dan pemerintah desa, terutama Kaur Kesra yang memiliki peran dalam memberikan dukungan administratif dan memverifikasi data penerima. Kaur Kesra memiliki tanggung jawab untuk memastikan data yang akurat, melakukan verifikasi yang jelas, serta mengatur perubahan data melalui proses musyawarah desa sebelum diajukan ke Dinas Sosial. Namun, keterbatasan sistem SIKS-NG yang hanya menampilkan data tahun berjalan tanpa riwayat historis menjadi hambatan, karena menghalangi desa dalam menilai perubahan status penerima dan efektivitas penargetan bantuan dalam jangka panjang.

Dalam melihat ketepatan sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun, selain menggunakan hasil wawancara dengan pemerintah desa dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data jumlah KPM BPNT. Data tersebut digunakan untuk melihat perubahan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun serta menjadi data pendukung dalam menilai proses penetapan dan pemutakhiran penerima BPNT di Desa Bangun. Adapun jumlah KPM Desa Bangun selama tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Jumlah KPM BPNT Desa Bangun Tahun 2022-2025

Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keterangan
2022	90 KPM	Jumlah KPM penerima BPNT di Desa Bangun
2023	95 KPM	Jumlah KPM mengalami peningkatan
2024	100 KPM	Jumlah KPM kembali mengalami peningkatan
2025	98 KPM	Dari 100 KPM, setelah dilakukan verifikasi terdapat 98 KPM yang ditetapkan sebagai penerima. 2 calon KPM tidak ditetapkan karena berada pada desil 6-10

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (2025), DTKS (2025), dan hasil observasi lapangan, diolah peneliti.

Berdasarkan tabel 4, jumlah KPM BPNT di Desa Bangun mengalami perubahan selama periode 2022-2025. jumlah penerima pada tahun 2022 sebanyak 90 KPM, kemudian meningkat menjadi 95 KPM pada tahun 2023 dan 100 KPM pada tahun 2024. pada tahun 2025, jumlah KPM menjadi 98 orang. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerima BPNT dapat mengalami penyesuaian berdasarkan hasil verifikasi dan pemutakhiran data, sehingga daftar penerima tidak bersifat tetap dari tahun ke tahun.

Hal yang menarik terlihat pada tahun 2025, ketika terdapat 100 calon KPM tetapi setelah dilakukan proses verifikasi hanya 98 orang yang ditetapkan sebagai penerima. Dua calon KPM tidak ditetapkan karena berdasarkan data kesejahteraannya berada pada desil 6-10 sehingga tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan penerima tidak hanya didasarkan pada data penerima sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan hasil verifikasi terhadap kelayakan calon penerima. Dengan demikian data sekunder tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat proses penyaringan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima BPNT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mashuri, selaku Kaur Kesra Desa Bangun, diperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur verifikasi data penerima BPNT. Ia mengungkapkan;

“Setiap awal tahun kami menerima data dari Dinas Sosial melalui DTKS. Data tersebut kami bawa ke musyawarah desa bersama dengan RT dan RW untuk diperiksa kembali, guna memastikan apakah penerimanya masih memenuhi syarat. Kami mengunjungi rumah-rumah warga untuk menilai keadaan ekonomi dan rutinitas mereka. Jika ada yang sudah mampu, pindah, atau telah meninggal, kami membuat daftar pengganti. Semua laporan tersebut kami kirimkan ke Dinsos melalui TKSK. Namun, masalahnya adalah aplikasi SIKS-NG hanya menampilkan data tahun berjalan, jadi untuk melihat data dari tahun-tahun sebelumnya, kami harus mengajukan permintaan langsung ke Dinas Sosial. Kadang-kadang warga bertanya kenapa ada yang baru mendapatkan, dan ada yang tidak, kami sulit menjelaskannya karena informasi yang ada di sistem terbatas.” (Wawancara, 5

November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dilakukan secara aktif oleh aparat desa dengan pendekatan sosial yang didasarkan pada musyawarah dan pengamatan langsung. Nde memiliki peran penting dalam memastikan akurasi penerima manfaat melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Walaupun sudah diterapkan sistem digital, keterbatasan akses terhadap data historis yang tersedia membuat proses validasi tidak dapat dilakukan secara keseluruhan antarperiode.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilangsungkan terkait Dedik Ishariyanto, selaku Kepala Desa Bangun, semakin menegaskan penjelasan tersebut. Menjelaskan;

“Kami di desa bertanggung jawab untuk menjamin bahwa data penerima sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan masyarakat. Maka darinya, sebelum kami mengirimkan ke Dinas Sosial, kami melakukan verifikasi terlebih dahulu bersama perangkat RT dan RW. Semua hal disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa. Namun, karena tidak ada pendamping BPNT, perangkat desa harus turun langsung jika ada warga yang mengajukan protes atau meminta penjelasan. Kami pastikan bahwa jika ada yang tidak layak akan diganti, tetapi untuk data yang lama kami tidak memiliki arsip digitalnya karena sistem dari pusat tidak menunjukkan riwayat. Jadi, untuk melihat perubahan dari tahun lalu, kami harus meminta ke Dinsos melalui surat resmi.” (Wawancara, 6 November 2025).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Wiwit (45 tahun), yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan merupakan penerima manfaat BPNT di Desa Bangun, beliau menyatakan bahwa:

“Saya menerima bantuan ini karena kondisi keluarga kami cukup sulit, Mbak. Suami saya bekerja serabutan, dan pendapatannya tidak menentu. Saat nama saya pertama kali terdaftar sebagai penerima, saya merasa memang membutuhkan bantuan. Awalnya, saya tidak tahu bagaimana bisa mendapatkan bantuan ini, hanya dipanggil ke balai desa. Lalu, perangkat desa mengatakan bahwa ini sudah berdasarkan data dari pusat tetapi akan dicek lagi oleh RT. Mereka juga sempat datang untuk menanyakan tentang kondisi rumah dan pekerjaan suami saya. Jadi, menurut saya, sebenarnya ada proses pendataan sebelumnya, bukan sembarangan. Di sekitar saya, orang-orang yang

mendapatkan bantuan juga memiliki kondisi ekonomi yang serupa. Jika ada yang sudah lebih mampu, biasanya akan dibahas kembali di desa. Oleh karena itu, menurut saya, bantuan ini memang banyak diberikan kepada warga yang benar-benar memerlukan.” (Wawancara Ibu Wiwit, 11 September 2026).

Hasil wawancara dan pengamatan menjelaskan bahwa penentuan sasaran BPNT di Desa Bangun sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat melalui proses musyawarah desa dan didukung oleh administrasi yang cukup transparan, dengan pemerintah desa bermanifestasi menjadi penghubung antara sistem pusat dan kondisi setempat. Namun, kekurangan pada sistem data membuat proses evaluasi belum berjalan dengan cara meluas dengan optimal. Dalam hal dokumentasi, terungkap bahwa data penerima BPNT telah dikelola secara digital melalui aplikasi desa terintegrasi, dengan sekitar 100 KPM yang status keaktifannya tercatat secara elektronik dan dapat diakses untuk berbagai keperluan verifikasi. Sistem ini mempermudah kerjasama antara pemerintah desa, pendamping BPNT, dan Dinas Sosial dalam memastikan akurasi sasaran. Meskipun begitu, hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pemanfaatan data masih terbatas pada aspek administratif dan belum sepenuhnya digunakan untuk menganalisis perubahan dalam kondisi sosial ekonomi penerima secara berkelanjutan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerima BPNT di Desa Bangun terjaga melalui musyawarah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Proses ini memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Validasi dilaksanakan terkait mendatangi rumah penerima, memastikan keputusan berdasar data nyata. Namun, masalah utama terletak pada sistem digital yang terpusat, yang tidak menyimpan riwayat penerima dan memperbaharui data secara tahunan. Ketergantungan pada informasi dari Kementerian Sosial membatasi desa dalam memperbaiki data. Ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan sasaran jika keadaan ekonomi berubah. Keterlibatan Kaur Kesra dan Kepala Desa dalam verifikasi lapangan dapat mengurangi kesalahan distribusi. Musyawarah memperkuat keabsahan verifikasi karena keputusan diambil secara kolektif dan transparan.

Hasil studi menunjukkan bahwa akurasi penyaluran BPNT di Desa Bangun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan

ketidakakuratan informasi dalam DTKS. Secara nyata, teridentifikasi adanya kesalahan inklusi (penerima tidak berhak) dan kesalahan eksklusif (masyarakat yang membutuhkan belum terdaftar). Masalah ini muncul bukan sebatas karena kurangnya pembaruan informasi, akan tetapi disebabkan oleh keterbatasan sistem seperti SIKS-NG yang tidak menyediakan data sejarah mengenai perubahan status sosial ekonomi masyarakat secara mendalam. Maka darinya, proses verifikasi menjadi bersifat reaktif, bukan bersifat prediktif. Di samping itu, keterbatasan kemampuan aparat desa dalam melakukan validasi informasi secara rutin juga memperburuk situasi ini.

Secara analitis, kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan antara rancangan kebijakan berbasis data nasional dengan kenyataan lokal yang terus berubah. Dalam pandangan teori Budiani (2007), ketidaktepatan dalam penyaluran ini menunjukkan bahwa indikator efektivitas program belum berjalan dengan baik. Selain itu, fenomena ini mencerminkan adanya dualisme peran pemerintah desa, di mana desa berfungsi bukan sebatas sebagai pengelola data, akan tapi sebagai aktor sosial yang memahami kondisi nyata masyarakat. Ketika kedua peran ini tidak seimbang, akurasi data menjadi terganggu. Maka darinya, diperlukan peningkatan integrasi sistem data yang fleksibel serta penguatan kapasitas desa dalam memperbaharui informasi berdasarkan partisipasi masyarakat agar kebijakan dapat menjadi lebih responsif dan tepat sasaran.

Analisis temuan menunjukkan pola sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang efektivitas program bantuan sosial. Namun, itu juga memberikan wawasan baru tentang bagaimana faktor administratif dan konteks lokal memengaruhi akurasi penerima. Penelitian oleh Rahman, Khumayah, dan Nursahidin pada tahun 2024 menunjukkan bahwa akurasi sangat tergantung pada sinkronisasi data antar lembaga. Di Desa Bangun, masalah akurasi muncul dari ketidakcocokan data, bukan proses seleksi di desa. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang melihat desa sebagai penerima informasi pasif, penelitian ini menunjukkan peran aktif pemerintah desa dalam pengelolaan data. Ketepatan sasaran juga bergantung pada kemampuan administratif desa, serta riwayat penerima yang tidak selalu tersedia dalam sistem SIKS-NG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketepatan sasaran BPNT dipengaruhi oleh kombinasi struktur kelembagaan, kapasitas verifikasi, dan keterbatasan sistem informasi sosial.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan elemen kedua dari teori efektivitas yang dijelaskan oleh Budiani (2007), yang berfungsi untuk mengevaluasi seberapa baik pelaksana kebijakan dapat menginformasikan masyarakat tentang prosedur, mekanisme, dan tujuan program dengan jelas. Tingkat efektivitas sosialisasi mencerminkan kemampuan komunikasi publik pemerintah dalam menanamkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga, serta memperkuat keterbukaan dalam pelaksanaan program. Dalam ranah kebijakan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sosialisasi memiliki peran vital sebagai penghubung antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan tingkat pemahaman di tingkat masyarakat. Semakin efektif dan sesuai metode sosialisasi dilaksanakan, semakin tinggi partisipasi serta kepatuhan masyarakat terhadap program tersebut. Sebaliknya, kurangnya sosialisasi bisa memicu kesalahpahaman administratif, minimnya pengetahuan tentang kebijakan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Secara sosial, tingkat pendidikan dan akses informasi di desa ini bervariasi. Sebagian penerima BPNT merupakan kelompok usia lanjut dan pekerja informal yang tidak familiar dengan teknologi digital seperti aplikasi perbankan atau platform online. Situasi ini menjadikan proses sosialisasi sangat penting untuk menjamin kelancaran program. Dari segi struktur, pelaksanaan sosialisasi program BPNT di Desa Bangun dilaksanakan oleh pemerintah desa tanpa adanya pendampingan khusus dari Dinas Sosial. Tanggung jawab utama berada di bawah pengawasan Kaur Kesra (Mashuri), yang bermanifestasi menjadi penghubung antara penerima manfaat dengan Dinas Sosial. Kepala Desa Dedik Ishariyanto terlibat aktif dalam mengawasi sosialisasi agar prosesnya berlangsung secara transparan dan menghindari kebingungan di kalangan publik. Umumnya, sosialisasi dilakukan menjelang penyaluran bantuan di balai desa, dengan pendekatan tatap muka antara aparaturnya dan penerima.

Pada indikator sosialisasi program, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Penggunaan regulasi tersebut disesuaikan dengan periode penelitian tahun 2025, karena Permensos Nomor 4 tahun 2023 telah berlaku sejak 28 Juli 2023 dan mengatur pelaksanaan Program

Sembako. Regulasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dipahami oleh KPM melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Berdasarkan Pasal 10, edukasi dan sosialisasi bertujuan agar KPM memahami produk dan tata cara penggunaan atau penarikan rekening Program Sembako, manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga, tata cara penyampaian pengaduan, serta penggunaan manfaat Program Sembako. Ketentuan mengenai edukasi dan sosialisasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pembandingan dengan kondisi pelaksanaan program di Desa Bangun, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.

Tabel 5. Ketentuan Edukasi dan Sosialisasi Program Sembako

Aspek Sosialisasi	Ketentuan Berdasarkan Permensos Nomor 4 Tahun 2023
Penggunaan dan penarikan rekening	KPM diberikan edukasi mengenai produk dan tata cara penggunaan atau penarikan rekening Program Sembako.
Literasi keuangan	KPM diberikan pemahaman mengenai manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga.
Pengaduan	KPM diberikan edukasi mengenai tata cara penyampaian pengaduan terkait pelaksanaan Program Sembako
Pemanfaatan bantuan	KPM diberikan pemahaman mengenai penggunaan manfaat Program Sembako
Pihak yang bertanggung jawab	Edukasi mengenai rekening serta literasi keuangan menjadi tanggung jawab bank penyalur, sedangkan edukasi mengenai pengaduan dan penggunaan manfaat menjadi tanggung jawab direktorat yang menangani Program Sembako serta dinas sosial daerah

Sumber: Permensos Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Pasal 10.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa edukasi dan sosialisasi dalam Program Sembako memiliki cakupan informasi yang cukup luas. Sosialisasi

tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai bantuan yang diterima KPM, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai penggunaan atau penarikan rekening, literasi keuangan, mekanisme pengaduan, dan penggunaan manfaat program. Selain itu, Permensos Nomor 4 Tahun 2023 juga membagi tanggung jawab edukasi dan sosialisasi kepada pihak yang berbeda sesuai dengan materi yang disampaikan, ketentuan tersebut menjadi dasar dalam melihat pelaksanaan sosialisasi program BPNT di Desa Bangun. Proses sosialisasi di Desa bangun dimulai dengan informasi tentang jadwal pencairan, jumlah bantuan, dan cara pengambilan dana melalui BNI atau ATM. Pemerintah desa mengumumkan bahwa BPNT sekarang hanya berupa uang tunai yang diterima di rekening, bukan bahan pangan seperti sebelumnya. Sosialisasi berlangsung terbuka, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang masalah administratif. Selain pertemuan resmi, sosialisasi juga dilakukan secara informal di kantor desa. Namun, kurangnya sarana komunikasi seperti papan informasi dan media sosial membuat informasi tidak tersebar merata, terutama di kalangan penerima manfaat lanjut usia yang masih bergantung pada penjelasan dari desa atau tetangga. Hal ini menciptakan kesenjangan antara komunikasi dan pemahaman masyarakat. Sosialisasi di Desa Bangun sudah membangun hubungan sosial yang baik, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menyebarkan informasi. Hasil wawancara dengan Mashuri (Kaur Kesra) memberikan detail tentang pelaksanaan sosialisasi BPNT di Desa Bangun.

“Biasanya, kami mengumpulkan semua penerima sebelum penyaluran bantuan. Kami menjelaskan bahwa saat ini BPNT tidak lagi berupa sembako, tetapi uang yang akan seketika disetorkan ke rekening masing-masing. Kami juga memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran dan cara mengambil uang di ATM atau agen BNI. Untuk mereka yang belum mengerti, kami menyediakan bantuan praktik secara langsung. Terkadang, ada warga baru yang belum tahu tentang bantuan ini, dan kami membantu membuatkan kartu serta mendaftarkan mereka melalui operator. Jika ada yang tidak menerima, kami memeriksa di aplikasi SIKS-NG, seringkali karena data yang ada berbeda dengan Capil atau rekening yang sudah tidak aktif. Kami juga membantu membuat surat pengantar ke Dinas Sosial agar mereka dapat memperbaikinya”. (Wawancara, 5 November 2025).

Penjelasan Kaur Kesra menunjukkan bahwa sosialisasi di Desa Bangun dilaksanakan terkait pendekatan yang personal dan partisipatif. Ia bukan sebatas memberikan informasi teknis, akan tapi memberikan pendampingan langsung kepada penerima manfaat yang kesulitan dalam memahami mekanisme digital. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kaur Kesra melampaui fungsi administratif, menjadi fasilitator sosial yang mencoba menjembatani keterbatasan literasi digital warga dengan tuntutan sistem BPNT yang berbasis non-tunai. Sementara itu, Kepala Desa Dedik Ishariyanto menegaskan dalam wawancara pada 6 November 2025 mengenai peran penting pemerintah desa dalam memastikan transparansi informasi program. Ia menyatakan,

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa BPNT adalah program dari pemerintah pusat untuk mendukung ketahanan pangan. Setiap kali ada pencairan, kami selalu mendampingi warga agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan atau penipuan. Kami menyarankan agar penggunaan uang bantuan diarahkan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk hal-hal lain. Sosialisasi kami lakukan secara langsung karena sebagian warga tidak aktif menggunakan ponsel atau media sosial. Jika ada masalah, seperti bantuan yang tidak masuk, kami membantu berkomunikasi dengan Dinsos melalui TKSK. Dengan demikian, desa bermanifestasi menjadi jembatan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan masyarakat tahu bagaimana cara mengelolanya. ” (Wawancara, 6 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Wiwit (45 tahun), seorang ibu rumah tangga yang merupakan penerima manfaat BPNT di Desa Bangun, ia menyampaikan bahwa:

“Saya pada awalnya hanya mendengar informasi dari orang-orang di sekitar, kabarnya ada bantuan baru dari pemerintah. Saat itu, tetangga sempat berkata bahwa akan ada panggilan ke balai desa. Saya sendiri sebenarnya kurang mengerti bantuan apa yang dimaksud, karena sebelumnya pernah menerima sembako juga. Jadi, saya pikir mungkin bantuan yang datang nanti berupa beras atau minyak seperti yang biasa. Ketika tiba di balai desa, petugas mulai menjelaskan pelan-pelan kepada warga. Mereka mengatakan bahwa sekarang jenis bantuannya telah berubah, bukan dalam bentuk barang lagi, melainkan berupa uang tunai. Saya sempat bingung, mengapa uangnya tidak diberikan

secara langsung, ternyata masuk ke dalam rekening. Kemudian dijelaskan bahwa nanti ada kartu bantuan yang berfungsi seperti ATM. Saat itu, saya hanya mendengarkan, karena saya belum pernah menggunakan kartu semacam itu. Setelah pulang, saya berbincang lagi dengan tetangga agar lebih memahami. Jadi, pemahamannya datang secara bertahap, tidak langsung bisa paham setelah satu kali penjelasan. ” (Wawancara Ibu Wiwit, 11 September 2026).

Dari tiga wawancara, terlihat bahwa sosialisasi program di Desa Bangun fokus pada pelayanan langsung. Ketiga informan menyoroti peran aktif pemerintah desa dalam transparansi informasi dan pendampingan warga saat pelaksanaan BPNT. Komunikasi dilakukan secara langsung dan dialogis, sesuai dengan karakter sosial komunitas yang belum sepenuhnya digital. Pendekatan tatap muka dianggap efektif untuk kelompok dengan literasi digital rendah. Ini juga memperkuat ikatan emosional dan rasa percaya. Namun, strategi ini bisa menyebabkan informasi tidak tersip dengan baik dan sulit dilacak jika terjadi kesalahan administrasi.

Proses sosialisasi yang berlangsung di Desa Bangun lebih bersifat reaktif dibandingkan proaktif. Pemerintah desa biasanya hanya melakukan komunikasi intensif saat penyaluran bantuan atau ketika muncul masalah teknis seperti kegagalan penyaluran, perbedaan data, atau rekening yang tidak aktif. Maka darinya, peran sosialisasi lebih banyak bermanifestasi menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah, ketimbang membangun pemahaman kebijakan dengan cara meluas. Dalam kacamata efektivitas kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan administratif tercapai, sisi edukatif dari sosialisasi belum terlaksana secara maksimal.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyebaran informasi terkait program BPNT di Desa Bangun belum efektif, terlihat dari masih rendahnya pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai cara kerja program ini, termasuk pemakaian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan tujuan dari bantuan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan lebih bersifat satu arah dan hanya mencakup penyampaian informasi teknis tanpa menjelaskan makna program secara mendalam. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya waktu, sumber daya, serta metode komunikasi yang belum melibatkan partisipasi aktif.

Secara analisis, lemahnya penyebaran informasi bukan hanya masalah teknis,

tetapi mencerminkan kurangnya pergeseran dari pendekatan administratif ke pendekatan pemberdayaan. Dalam konteks teori Budiani (2007), situasi ini menunjukkan bahwa indikator sosialisasi belum tercapai dengan baik. Di samping itu, fenomena ini kembali menyoroti adanya dualisme dalam peran pemerintah desa, di mana seharusnya desa bukan sebatas memberikan informasi, akan tetapi menjadi fasilitator untuk pembelajaran sosial bagi warga. Jika fungsi pendampingan ini tidak berjalan dengan baik, maka program hanya dipersepsikan sebagai bantuan biasa, bukan sebagai alat guna menguatkan kesejahteraan. Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan pentingnya model sosialisasi yang bersifat komunitas, interaktif, berkelanjutan, dan disertai pendidikan ekonomi agar masyarakat semakin mandiri.

Analisis tentang indikator sosialisasi program menunjukkan kesamaan dan perbedaan teoretis dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan komunikasi kebijakan dalam program perlindungan sosial. Penelitian Puspita (2023) menemukan bahwa efektivitas sosialisasi dipengaruhi oleh saluran informasi, terutama kombinasi interaksi tatap muka dan digital. Namun, di Desa Bangun, efektivitas tidak bergantung pada media, melainkan pada konsistensi interaksi langsung oleh pemerintah desa, terutama di antara penerima dengan pendidikan rendah dan sedikit akses ke teknologi digital. Penelitian Sukmana (2021) menyatakan bahwa tantangan sosialisasi disebabkan kurangnya koordinasi antar lembaga, tetapi studi ini menemukan bahwa kerjasama antara desa dan pendamping BPNT sudah baik, meski ada masalah dalam dokumentasi sosialisasi. Selain itu, sosialisasi diakui sebagai dialog, di mana penerima aktif bertanya dan menyampaikan keluhan, yang langsung direspon oleh pihak desa. Penelitian ini menambah perspektif baru dengan menekankan bahwa efektivitas sosialisasi terkait dengan interaksi sosial antara pelaksana dan penerima.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan indikator ketiga dalam teori efektivitas menurut Budiani (2007) yang mengevaluasi seberapa jauh hasil dari suatu kebijakan sesuai dengan sasaran dan niat yang telah ditetapkan. Indikator ini lebih mengutamakan kemampuan program dalam memberikan efek positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, dan bukan hanya menyelesaikan tugas administratif semata. Pencapaian tujuan melibatkan dimensi hasil (output) dan

manfaat (outcome), yaitu sejauh mana program bukan sebatas terlaksana, akan tapi berkontribusi dalam meningkatkan keadaan sosial ekonomi dari mereka yang menerima manfaat. Dalam kerangka Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pencapaian tujuan dievaluasi berdasarkan sejauh mana bantuan tersebut dapat memastikan ketahanan pangan, mengurangi beban biaya hidup bagi keluarga miskin, serta memperkuat kemandirian ekonomi dari para penerima. Maka darinya, efektivitas pencapaian tujuan bukan sebatas bergantung pada keakuratan mekanisme distribusi, akan tapi pada sejauh mana pelaksana dapat menciptakan dampak sosial yang berkesinambungan pada tingkat lokal.

Desa Bangun, yang merupakan salah satu desa dengan jumlah penerima bantuan sosial yang relatif tinggi di Kecamatan Pungging, dijadikan contoh representatif untuk mengkaji efektivitas pencapaian tujuan dari program BPNT. Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pejabat desa, terungkap bahwa sistem distribusi BPNT di Desa Bangun telah sepenuhnya beralih dari bentuk bantuan barang (sembako) menjadi sistem transfer uang tunai melalui rekening penerima yang dikelola oleh Bank BNI. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 setiap tiga bulan, yang setara dengan Rp200.000 secara bulanan, dan dapat diakses melalui agen BNI atau ATM yang ditunjuk.

Perubahan sistem ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dengan tujuan guna menguatkan efisiensi dalam distribusi serta transparansi finansial. Dengan penerapan sistem perbankan digital, pemerintah berharap proses distribusi akan berjalan lebih cepat, akuntabel, dan meminimalkan risiko penyimpangan pada tingkat pelaksana. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas sistem baru ini di Desa Bangun masih menemui berbagai tantangan teknis dan administratif. Tidak semua penerima bantuan memahami prosedur perbankan digital dengan baik. Banyak dari mereka, terutama di kalangan lanjut usia dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, masih memerlukan bimbingan saat mengambil dana atau dalam mengajukan keluhan ketika bantuan tidak keluar.

Peranan pemerintah desa, khususnya Kaur Kesra (Nde) dan Kepala Desa Dedik Ishariyanto, sangat penting dalam menjembatani hubungan antara penerima bantuan dan sistem digitalisasi keuangan tersebut. Kaur Kesra memiliki

tanggung jawab untuk memverifikasi data penerima, menanggapi pengaduan, serta memastikan bahwa dana yang belum tersalurkan dapat segera diproses. Sementara itu, Kepala Desa bermanifestasi menjadi pengawas dan pengambil keputusan strategis untuk memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan pengamatan, sistem ini menciptakan dinamika baru dalam pelayanan publik: di satu sisi, efisiensi meningkat, namun di sisi lain, beban administratif dan teknis pada tingkat desa juga bertambah.

Pencapaian sasaran BPNT di Desa Bangun bukan sebatas dinilai dari penyaluran bantuan kepada para penerima, akan tapi dari pengaruh sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut informasi dari narasumber, mayoritas penerima menggunakan dana bantuan untuk memenuhi keperluan dasar seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayuran. Tersebut selaras atas tujuan utama program yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan bagi keluarga yang kurang mampu. Namun, sampai penelitian ini dilakukan, belum ada mekanisme monitoring resmi untuk mengevaluasi apakah bantuan itu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Pemerintah desa hanya berperan memastikan proses pencairan berjalan dengan baik, tanpa memiliki indikator yang terukur untuk perubahan sosial ekonomi para penerima.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan terkait Mashuri (Kaur Kesra), dijelaskan dengan rinci langkah-langkah yang diambil ketika bantuan tidak berhasil disalurkan. Ia menyatakan:

"Apabila ada warga yang melapor bahwa bantuannya belum diterima, kami akan mengunjungi rumahnya terlebih dahulu untuk memverifikasi apakah kartunya masih aktif. Setelah itu, kami memeriksa melalui aplikasi SIKS-NG menggunakan nomor KK. Di aplikasi biasanya terdapat informasi, seperti data Capil yang tidak sesuai, rekening yang tidak aktif, atau masalah dalam verifikasi bank. Setelah mengetahui penyebabnya, kami akan membantu menyusun surat pengantar dari desa ke Dinas Sosial melalui TKSK. Terkadang kami juga mendampingi langsung warga ke agen BNI jika mereka mengalami kesulitan dalam menarik uang. Ada pula yang kehilangan kartu atau lupa PIN, sehingga kami membantu membuat surat keterangan untuk mencetak kartu baru di bank. Proses ini biasanya memerlukan waktu antara satu hingga dua minggu hingga

uang dapat dicairkan. " (Wawancara, 5 November 2025).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi BPNT di Desa Bangun sangat tergantung pada peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah-masalah administratif. Sistem pengaduan dilakukan secara langsung dan berbasis pelayanan, di mana aparat desa tidak sekedar berfungsi dalam kapasitas administratif, akan tetapi menjadi pendamping sosial bagi penerima bantuan. Kaur Kesra berperan sebagai penghubung antara warga, lembaga perbankan, dan Dinas Sosial agar masalah teknis dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Sementara itu, hasil wawancara yang dilangsungkan terkait Kepala Desa Dedik Ishariyanto menjelaskan upaya pemerintah desa untuk memastikan bahwa penyaluran berjalan dengan transparan dan sesuai dengan sasaran. Ia mengungkapkan:

"Kami memastikan bahwa semua penerima BPNT menerima haknya secara tepat waktu. Jika terjadi masalah seperti penyaluran yang gagal, kami meminta Kaur Kesra untuk turun langsung mengecek ke lapangan dan berkoordinasi dengan TKSK. Semua pengaduan dicatat agar ada jejak administrasi. Kami juga berusaha memastikan bahwa dana bantuan digunakan untuk keperluan dasar dan bukan untuk hal-hal lain. Namun, kami tidak memiliki wewenang untuk memantau secara langsung bagaimana penggunaan dana tersebut, karena itu merupakan ranah pribadi para penerima. Yang terpenting bagi kami adalah memastikan bantuan disalurkan dengan baik dan tidak ada yang terlewat. " (Wawancara, 6 November 2025).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Wiwit (45 tahun), seorang ibu rumah tangga yang merupakan penerima BPNT, ia mengungkapkan bahwa:

"Saya biasanya tidak mendapatkan bantuan setiap bulan. Kadang saya harus menunggu hingga beberapa bulan baru cair sekaligus. Jumlah yang biasa saya terima sekitar enam ratus ribu, karena itu jumlah total untuk tiga bulan. Waktu pertama kali mendapat segitu, saya merasa itu banyak, tetapi ternyata memang dijumlahkan. Uang tersebut langsung saya gunakan untuk keperluan dapur. Saya membeli beras, telur, minyak goreng, dan sayur-sayuran. Karena kebutuhan rumah tangga sekarang semakin mahal. Bantuan ini setidaknya sedikit membantu saya, jadi tidak terlalu berat memikirkan biaya belanja sehari-hari. Jika ada sisa

sedikit, saya simpan untuk keperluan sekolah anak. Jadi, bagi keluarga seperti kami, bantuan ini benar-benar bermanfaat sekali. " (Wawancara Ibu Wiwit, 11 September 2026).

Setelah mendengar pengalaman penerima manfaat yang dibagikan oleh Ibu Wiwit, dapat disimpulkan bahwa program BPNT memainkan peran penting dalam membantu keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Penggunaan dana bantuan untuk pembelian makanan menunjukkan bahwa program ini bertindak sebagai alat perlindungan sosial yang membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga, terutama saat biaya hidup semakin tinggi. Situasi tersebut tentunya berkaitan erat dengan perubahan tingkat kemiskinan di Desa Bangun yang telah mengalami variasi dalam beberapa tahun terakhir, terutama disebabkan oleh dampak dari pandemi dan perubahan ekonomi setelah krisis. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konteks sosial ekonomi di area penelitian, berikut akan disampaikan data mengenai jumlah penduduk miskin di Desa Bangun dari tahun 2017 hingga 2024.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2019	108,81	9,75
2020	118,8	10,57
2021	120,54	10,64
2022	111,03	9,71
2023	112,86	9,80
2024	108,72	9,37

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 108,81 ribu jiwa dengan persentase sebesar 9,75%. jumlah tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 118,80 ribu jiwa atau 10,57% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 120,54 ribu jiwa atau 10,64%. selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 111,03 ribu jiwa atau 9,71%, meskipun kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 112,86 ribu jiwa atau 9,80%. pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 108,72 ribu jiwa dengan persentase sebesar 9,37%. data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi selama periode 2019-2024, kondisi kemiskinan

di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Data jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tabel di atas digunakan sebagai gambaran umum kondisi kemiskinan daerah, karena data penduduk miskin pada tingkat Desa Bangun tidak tersedia dalam publikasi BPS yang digunakan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Program BPNT memiliki tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima manfaat (KPM) sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, pencapaian tujuan BPNT dalam penelitian ini tidak diukur hanya berdasarkan perubahan jumlah penduduk miskin pada tingkat Kabupaten Mojokerto, tetapi juga dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh KPM di Desa Bangun Kecamatan Pungging. Maka darinya, data yang diperoleh memperkuat pernyataan para informan bahwa tujuan dari program ini bukan hanya untuk memberikan bantuan sementara, akan tapi berusaha guna menguatkan kondisi sosial-ekonomi secara berangsur-angsur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan BPNT di Desa Bangun lebih tertumpu pada aspek distribusi daripada dampak jangka panjang. Program ini secara fungsional sukses dalam membantu masyarakat untuk mencukupi keperluan pangan serta meminimalisir beban ekonomi lewat mekanisme bantuan tunai yang lebih fleksibel dan efisien. Temuan tersebut selaras atas analisa dari Rahman et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa BPNT efektif dalam mengurangi pengeluaran untuk pangan, tetapi belum bisa meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh variabel teknis seperti ketidakakuratan data, masalah dalam penyaluran, serta kekurangan sistem SIKS-NG yang tidak menyediakan data masa lalu, sehingga evaluasi yang berkelanjutan menjadi sulit dilaksanakan (Hermawan, 2021). Maka darinya, BPNT lebih bermanifestasi menjadi penstabil konsumsi ketimbang sebagai alat guna menguatkan kesejahteraan. Dari sudut pandang analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program masih belum optimal menurut Budiani (2007), karena belum menghasilkan perubahan struktural. Ini juga menekankan adanya dualisme peran pemerintah desa antara fungsi distribusi bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, perlu dilakukan integrasi antara BPNT dan program pemberdayaan ekonomi lokal agar

manfaatnya bisa lebih berkelanjutan dan bukan sebatas bersifat konsumtif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berdasarkan tiga indikator efektivitas program menurut Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BPNT telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, tetapi pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Pada indikator ketepatan sasaran, pelaksanaan BPNT di Desa Bangun telah didukung oleh proses verifikasi dan pemutakhiran data melalui pemerintah desa, RT/RW, musyawarah desa, serta pengecekan kondisi penerima di lapangan. Hal tersebut terlihat pada tahun 2025 ketika terdapat 100 calon KPM dan setelah dilakukan verifikasi berdasarkan kondisi dan desil kesejahteraan, sebanyak 2 orang berada pada desil 6-10 sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima dan jumlah KPM menjadi 98 orang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk menyesuaikan penerima bantuan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, ketepatan sasaran masih menghadapi kendala karena keterbatasan sistem informasi yang belum menyediakan riwayat data penerima dari waktu ke waktu belum dapat dilakukan secara optimal.

Pada indikator sosialisasi program, pemerintah Desa Bangun telah melaksanakan penyampaian informasi dan pendampingan kepada KPM, terutama berkaitan dengan jadwal pencairan, mekanisme penerimaan bantuan, penggunaan rekening atau Kartu Keluarga Sejahtera, serta penyelesaian permasalahan administrasi. Akan tetapi, sosialisasi masih cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan ketika mendekati penyaluran bantuan atau ketika muncul permasalahan. Hasil wawancara dengan KPM juga menunjukkan bahwa pemahaman mengenai mekanisme BPNT tidak selalu diperoleh secara langsung dalam satu kali sosialisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator sosialisasi program belum sepenuhnya optimal karena kegiatan penyampaian informasi belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

Pada indikator pencapaian tujuan, BPNT telah memberikan manfaat langsung

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

bagi KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan sayuran. Hal tersebut menunjukkan bahwa bantuan telah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dasar penerima dan mendukung tujuan program dalam membantu pemenuhan pangan masyarakat. Namun, penelitian ini belum menemukan mekanisme pemantauan yang secara khusus mengukur perubahan kesejahteraan KPM dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pencapaian tujuan BPNT dapat dikatakan terlihat pada manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan pangan dan pengurangan beban ekonomi, tetapi belum dapat dinilai secara menyeluruh dari sisi dampak kesejahteraan jangka panjang.

Dengan demikian, efektivitas implementasi BPNT di Desa Bangun menunjukkan bahwa program telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Ketepatan sasaran perlu diperkuat melalui pemutakhiran dan integrasi data yang lebih baik, sosialisasi perlu dilakukan secara lebih rutin dan terencana, sedangkan pencapaian tujuan perlu didukung dengan mekanisme pemantauan manfaat program agar perubahan kondisi sosial ekonomi KPM dapat diketahui secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Desa Bangun Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Pertama, pada aspek ketepatan sasaran, pemerintah desa bersama dengan Dinas Sosial perlu meningkatkan pemutakhiran dan verifikasi data penerima secara berkala. Pemerintah desa juga perlu mempertahankan keterlibatan RT/RW dan masyarakat dalam proses verifikasi kondisi penerima agar perubahan kondisi sosial ekonomi dapat segera diketahui. Selain itu, diperlukan penguatan sistem informasi yang dapat menyimpan riwayat perubahan data penerima sehingga pemerintah desa dapat melakukan pemantauan terhadap perubahan status KPM secara lebih mudah dan berkelanjutan.

Kedua, pada aspek sosialisasi program, pemerintah desa perlu mengubah pola sosialisasi yang selama ini cenderung reaktif menjadi lebih terencana dan

berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan ketika bantuan akan disalurkan atau ketika muncul permasalahan, tetapi dapat dilaksanakan secara berkala dengan materi yang mencakup tujuan program, kriteria penerima, mekanisme pencairan, hak dan kewajiban KPM, serta mekanisme pengaduan. Penyampaian informasi juga dapat memanfaatkan berbagai media yang mudah dijangkau masyarakat, seperti papan informasi desa, grup komunikasi warga, dan media sosial desa, dengan tetap mempertahankan sosialisasi tatap muka bagi KPM yang membutuhkan pendampingan secara langsung.

Ketiga, pada aspek pencapaian tujuan, pemerintah desa dan pihak terkait perlu meningkatkan pemantauan terhadap manfaat bantuan yang diterima KPM. Pemantauan tidak hanya diarahkan pada apakah bantuan telah tersalurkan, tetapi juga pada pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Evaluasi secara berkala dapat dilakukan untuk mengetahui apakah bantuan masih memberikan manfaat bagi KPM dan apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi yang perlu menjadi pertimbangan dalam pemutakhiran data penerima.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan wilayah dan periode yang lebih luas serta menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji perubahan kondisi sosial ekonomi KPM dalam jangka panjang sehingga dampak BPNT terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis secara lebih mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfia, L. (2016). Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). In *Luthfi Alfia/ JIAP* (Vol. 2, Number 3).
- Hermawan, I. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 131–145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2237>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (V. Knight, Ed.; third edit). SAGE Publications, Inc. All.
- Feny Sahara, Faizal Anwar, & Titi Darmi. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v4i2.4689>
- Firdausyah, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21. *Tali Jagat Journal*, 1(1), 16–20.
- Hadita, A., Nurbudiwati, N., & Andriansyah, A. (2021). Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul. In *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* (Vol. 12, Number 2).

- <https://doi.org/10.36624/jpkp.v12i2.80>
- Puspita, K. S. R. (2023). *Program Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Gilang*.
- Lenaini, I., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2021). *Teknis Pengambilan Sample Purposive Dan Snowball Sampling*. 6(1), 33–39.
- Mawarda, Y. O., Isbandono, P., Febiyanti, A. N., Asmara, M. P., Safitri, Y. D., Septiani, D. W., & Sari, Y. E. K. (2025). *Implementation Of “Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” Program Policy In Ngusikan Village, Jombang Regency* (pp. 2067–2082).
https://doi.org/10.2991/978-2-38476-317-7_185
- Nazalia, D., & Riyadh UB, A. (2022). Effectiveness of the Cepet Mule Program in Administrative Services. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19, 3–7.
<https://doi.org/10.21070/ijppr.v19i0.1240>
- Nizar Purnama, I. (2023). *EVALUASI KEBIJAKAN SOSIAL (STUDI PADA PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KOTA SERANG)* (Vol. 13).
- Normalita, P., & Sekarini, D. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo The Effectiveness of the Staple Food Assistance Program Affected by Covid-19 in Wunut Village, Porong District, Sidoarjo Regency*.
- Oktavia, S., & Djamaluddin, S. (2024). The Effect of E-Warong Accessibility on Household Consumption. In *Asian Journal of Social and Humanities* (Vol. 2, Number 6).
<https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i6.267>
- Pramesti, R., Muhammad, A. S., & Safitri, D. P. (2019). Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 81. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34583>
- Purnawansa, sena wahyu., Wardhana, Aditya., Renggo, yuniarti reny., Hudang, adrianus kabubu., Darwin., Sayekti, siskha putri., Nugrohowardani, rambu luba kata respati., Amruddin., Hardiyani, tati., Tondok, santalia banne., & Prisusanti, retno dewi. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Number March).
- Putra, R. E., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT melalui E-Warong Versus PT Pos Indonesia di Kota Padang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 266–280. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.4932>
- Rahmawati, S. (2024). Implementasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.19127>
- Sitompul, K. M., & Rajagukguk, J. (2024). Implementasi Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kantor Desa Medan Estate. *Journal Focus Administrasi Publik*.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/japan/article/view/2634%0Ahttps://ejournal.uhn.ac.id/index.php/japan/article/download/2634/1221>
- Praja, D. T. A. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kabupaten Garut. In *Jurnal Publik* (Vol. 14, Number 2). <https://doi.org/10.52434/jp.v14i2.26>
- Tris Dina Susanti. (2024). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka*.
- Widiati, Y. (2024). the Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program Implementation As an Effort To Handle the Proverty in Panyipatan Village Panyipatan Sub-District Tana Laut District. *Jurnal PubBis*, 7(1), 2023. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i1.724>
- Widjatmika, K. P. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Etika Jurnalisme Terhadap Koran Kuning : Suatu Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Number 2).

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.